

Executive Summary

**KESETARAAN GENDER
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASURUAN**

**(Studi atas *Gender Mainstreaming* pada MI Wali Songo dan
SD Muhammadiyah Gempol, Pasuruan)**



Oleh
Budi Ichwayudi

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LEMBAGA PENELITIAN
SURABAYA**

2013

A. Abstract

Gender relations in the field of education who also happens inequities, this is due to various factors including the factor leader / leaders or policy makers in the two institutions.

[illegible]

B. Latar Belakang Masalah

Rasanya, arus perjuangan ke arah kesetaraan gender tidak mungkin lagi dibendung. Garis-Garis Besar Haluan Negara RI 1999 telah meletakkan keadilan gender sebagai salah satu kerangka pembangunan Indonesia. Secara lebih khusus, kebijakan mengenai *gender mainstreaming* / pengarusutamaan gender (PUG) diatur melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Inpres ini menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan nasional maupun program pembangunan daerah harus disusun dalam perspektif gender. Ini berarti bahwa keadilan dalam relasi gender menjadi kerangka bagi keseluruhan program pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Akan tetapi, kebijakan seringkali menjadi mandul jika berhadapan dengan tradisi. Ideologi patriarkhis yang menempatkan perempuan tidak lebih sebagai pelengkap laki-laki masih sangat kuat mengakar dalam tradisi Indonesia. Wajah budaya kita selama ini sangat kental dengan nilai-nilai patriarkhis. Peran perempuan hanya dibatasi semata-mata fungsi reproduktif. Fungsi reproduktif inilah yang selama ini dijadikan sebagai tolok ukur ideal peran perempuan, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat.

Ketika berbicara tentang tradisi, kita tidak bisa mengabaikan peran agama dalam pembentukan pandangan tradisi ini. Menurut Carmody,¹ agama memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun atau mengekalkan mitos tentang subordinasi perempuan di bawah laki-laki. Sangat mudah untuk menemukan interpretasi keagamaan yang melestarikan ketimpangan relasi gender.

Terkait dengan ini, maka adalah penting untuk melihat bagaimana relasi gender dalam lembaga pendidikan Islam di Pasuruan. Paling tidak, ada empat alasan mengapa ini menarik untuk diteliti. *Pertama*, lembaga pendidikan Islam secara umum memiliki dua komitmen utama: Sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan lembaga dakwah yang bertujuan untuk mempertahankan bangunan ajaran agama Islam. Lembaga pendidikan Islam memproduksi suatu gagasan keagamaan tertentu yang kemudian ditransmisikan melalui proses pengajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan melihat fakta ini, bisa diasumsikan sangat kuat bahwa cara pandang keagamaan siswa sangat diwarnai oleh paham keagamaan yang diproduksi

¹ Denise Lardner Carmody, *Mythological Woman: Contemporary Reflections on Ancient Religious Stories* (New York: Crossroad, 1992).

Kedua, banyak diakui bahwa salah satu kendala perjuangan ke arah kesetaraan gender banyak mendapat tentangan dari kalangan agamawan. Banyak tradisi dan doktrin-doktrin keagamaan yang mensubordinasi perempuan. Maka, bisa dibayangkan bahwa budaya patriarkhis cukup kental di dalam proses pendidikan di lembaga berbasis agama. Kalau memang ini yang terjadi, strategi *gender mainstreaming* kurang lebih akan menemui hambatan yang sangat keras.

Keempat, berbicara tentang masyarakat Islam di Pasuruan, tentu tidak bisa diabaikan dua ormas Islam besar: NU dan Muhammadiyah. Sejauh kita berbicara tentang komunitas terdidik kedua ormas tersebut, maka itu berarti kita membicarakan tentang lembaga pendidikan yang dimiliki keduanya.

C. Rumusan Masalah

Masalah umum di atas dapat diperinci sebagai berikut:

Sumber data non-manusia terdiri atas dokumentasi dan/atau statistik. Sumber data non-manusia digunakan untuk mendapatkan data-data primer, yaitu segala peraturan perundang-undangan serta segala bentuk keputusan dan kebijakan di lingkungan dua lembaga pendidikan tersebut. Termasuk data primer yang dihasilkan di sini adalah distribusi pegawai-guru menurut variable latar belakang pendidikan, karir kerja (fungsional dan struktural), dan jenis kelamin.

Mengacu pada jenis data di atas, maka data-data dapat dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan:

- ### *Analisis Data*

² Eri Rossatria & Abdurrahman Shaleh, “Gender Mainstreaming,” dalam Tim Penulis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah & McGill Project/IISEP, 2003), 254.

Sebagaimana sifat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka seluruh analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu **deskriptif-naratif**. Dengan kata lain, semua data dianalisis secara deskriptif untuk menampilkan realitas PUG di tingkat kelembagaan masing-masing lembaga yang diteliti.

1. Kesetaraan dan Keadilan

Penggambaran keseimbangan laki-laki dan perempuan juga diperlihatkan oleh Sachiko Murata yang memandang keseimbangan itu mengacu pada dualitas Taoisme yang saling menyatu.³ Dualitas Taoisme terdapat kesamaan konsep dengan Islam yaitu keagungan Tuhan dengan keindahan-nya. Yin-Yang merupakan dualitas pada keseimbangan. *Yang* memberi makna yang identik dengan sifat keagungannya, yakni Jalal, Qahr ; sedangkan *Yin* identik dengan sifat keindahan (Jamal, Luthf, rahmah). Dalam penjelasan selanjutnya ia mengatakan bahwa feminitas dan maskulinitas ada pada manusia dan masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Sifat feminin dengan ciri lemah lembut dan menyerah adalah positif ketika manusia pada posisi di hadapan Tuhan, sedangkan sifat maskulin yang positif adalah untuk melawan dan mengalahkan nafsu amarah menuju nafsu muthmainah dan dapat mengontrol dirinya.⁴

³ Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. terj. Rahmani Astuti dan NS Nasrullah. (Mizan : Bandung , 1999).

[illegible]

Dalam Islam bekerja merupakan hak bagi laki-laki dan perempuan. Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan apabila ia ingin berbuat dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah.⁷ Agama yang diyakini memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Islam tidak pernah menelantarkan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan di rumah maupun luar rumah, baik di ranah publik maupun domestik. Pekerja perempuan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab, baik perusahaan maupun oleh majikan. Jika hak-hak ini dipenuhi, maka kemungkinan persoalan antar buruh dan majikan atau perusahaan dapat dihindari. Dengan dipenuhinya hak-hak buruh atau pekerja, berarti telah diakui manusia sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.

⁵ Lihat dalam Dzhayatin, Siti Ruhaini. “Gender dalam Tatahan Internasional dan Nasional” dalam Din Wakhid (Ed.). *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan* (Jakarta: PPIM dan British Embassy, 2007).

⁶ Mukherjee, Nilanjana *Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencarian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*. (Kerjasama Departemen Bantuan Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, 2002)

⁷ Lebih lanjut silahkan dilihat dalam Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an*. (Jakarta: Paramadina, 2003)

Kewajiban adanya perlindungan untuk perempuan dalam Islam bertujuan agar perempuan tetap dapat melakukan kerja-kerja sosial dengan aman tanpa gangguan, dan juga pada wilayah sosial ekonomi ketika perempuan menjadi buruh atau pekerja. Sebagaimana tercermin dalam surat al-Baqarah:233, “.....Seseorang itu tidak (boleh) dibebani dengan sesuatu di atas kemampuannya”. Dalam hal perlindungan terhadap buruh perempuan Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin mengemukakan suatu pernyataan yang menarik : “Pekerja adalah suatu hal yang dihormati. Di dalam hal-hal yang dihormati ada imbalannya. Hak seorang buruh adalah mengambil imbalannya itu sesuai dengan pekerjaannya”. Hak-hak buruh atau pekerja harus dipenuhi oleh majikan atau perusahaan agar mereka memiliki keleluasaan bekerja secara maksimal dan berdaya guna.⁹ Pemenuhan hak-hak dasar adalah imbalan wajib yang harus diterima seorang buruh. Bekerja adalah kehormatan, mempekerjakan orang dan memberi upah adalah upaya untuk melestarikan kehormatan tersebut.

⁸ Lihat dalam Yanggo Tahido, Huzaimah.. “Perindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan” dalam Dadang S. Anshori (Ed.). *Membincang Feminisme. Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

[illegible]

memberikan keadilan bagi perempuan, tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja.¹⁰

2. Analisis Gender Mainstreaming Di 2 (Dua) Lembaga Pendidikan Islam Gempol Pasuruan

Berdasarkan paparan teori dan deskripsi penelitian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis mencoba untuk menganalisis teori yang ada dan realitasnya berdasarkan observasi di lapangan maka penulis menjumpai beberapa hal sebagai berikut :

a. SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan

Untuk mengukur bagaimana kedudukan / eksistensi Gender Mainstreaming yang terdapat di SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan ternyata dalam pelaksanaannya memang masih terdapat sisi-sisi yang masih dianggap bahwa posisi laki-laki dalam proses pembelajaran dan pendidikan di SD Muhammadiyah masih muncul ketidaksetaraan dan keadilan meskipun berdasarkan observasi penulis terlihat ditutup-tutupi.

Bila dilihat dari perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan sebenarnya mulai muncul bahwa jumlah tenaga guru perempuan di SD Muhammadiyah 1 Gempol Pasuruan mulai menunjukkan peranan dan kiprahnya di dunia pendidikan yaitu lebih banyak bila dibandingkan guru laki-laki yaitu Guru Laki-laki berjumlah 4 orang, Sedangkan guru perempuan berjumlah 5 orang tetapi dalam pelaksanaannya ketika pemilihan Kepala Sekolah ternyata dominasi laki-laki masih menunjukkan eksistensinya bila dibanding Guru perempuan, sehingga kepala sekolah yang dipilih adalah seorang laki-laki yaitu Bapak Riyono yang masa baktinya mulai 2008 – 2014, hal ini ternyata sangat berbeda bila pada waktu sebelumnya. Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa sebelumnya kepala sekolah dijabat oleh seorang perempuan, tetapi dalam perkembangannya ketika terjadi pemilihan ternyata sosok kepala sekolah perempuan yang dulu merasa lebih baik kepala sekolah dipimpin seorang laki-laki karena anggapan di masyarakat laki-laki lebih baik dan unggul dalam segala bidang, padahal kenyataan di lapangan belum

¹⁰ Murti M.S., Krisni. dalam Jurnal Perempuan No 44. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Patimah. 2003. "Dinamika Ekonomi Perempuan dalam Industri Kecil dan Menengah" dalam Jurnal Equalita. Vol. 3. No. 2. Juni 2003.

Ketika menentukan visi dan misi pendidikan maka yang berperan penting dalam perumusannya juga lebih dominan visi dan misi dari para guru laki-laki bila dibanding dengan guru perempuan bahkan rumusan visi dengan secara jelas mencantumkan seorang kata-kata seorang "muslim" dan bukan "muslimah", visi tersebut adalah sebagai berikut : *"Melahirkan Manusia **Muslim**, Berakhlaq Mulia, Cakap, Percaya Diri Sendiri serta Memiliki Aqidah Islamiyah yang Kuat dan Istiqomah"*.

1. Menanamkan aqidah Islam yang kuat
2. Membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari
3. Membiasakan berfikir rasional
4. Memberikan wadah keratifitas siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Menumbuhkan jiwa seni
6. Menumbuhkan ketrampilan dan pengetahuan
7. Memotivasi pengembangan skill siswa
8. Menumbuhkan budaya mandiri
9. Meningkatkan prestasi di segala bidang
10. Meningkatkan Kualitas SDM Pendidik
11. Membina Kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lembaga
12. Membina hubungan intensif dengan pihak orang tua atau wali murid

[illegible]

laki daripada perempuan.

Dengan demikian relasi Gender dalam dunia pendidikan khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Gempol Pasuruan diakui atau tidak diakui ternyata dominasi laki-laki atas perempuan tetap menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prestasi belajar banyak didominasi oleh siswa perempuan, namun dalam pelaksanaan eksistensi jati dirinya ternyata laki-laki lebih mendominasi. Hal ini jika dibandingkan dengan perempuan, baik ditinjau dari Guru, Siswa, kurikulum, dan manajemen pendidikannya.

II (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo Gempol Pasuruan

Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Gempol Pasuruan dalam pelaksanaan Gender di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan observasi penulis di lapangan ternyata masih ada meskipun agak ditutup-tutupi. Hal ini nampak sekali karena penulis mencoba untuk menanyakan eksistensi guru perempuan bila dibandingkan dengan guru laki-laki. Pertama ketika penulis mendatangi lembaga pendidikan tersebut di Gempol Pasuruan maka guru perempuan cenderung untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang kurang memuaskan.

II (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo Gempol Pasuruan

II (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo Gempol Pasuruan

II (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo Gempol Pasuruan

Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Gempol Pasuruan dalam pelaksanaan relasi der di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan observasi penulis di lapangan nyata masih ada meskipun agak ditutup-tutupi. Hal ini nampak sekali ketika penulis mencoba untuk menanyakan eksistensi guru perempuan bila dibanding gan guru laki-laki. Pertama ketika penulis mendatangi lembaga pendidikan ebut di Gempol Pasuruan maka guru perempuan cenderung untuk menutup diri m menyambut kedatangan kami bahkan guru perempuan banyak yang lebih yarankan untuk menanyakan berbagai informasi tentang lembaga pendidikan MI i Songo kepada guru laki-laki saja.

Ketika bertemu dengan Kepala Sekolah dan menanyakan berbagai hal dan berdasarkan observasi penulis maka dapat dianalisis bahwa relasi gender antara guru laki-laki dan perempuan sebenarnya tampak sangat kasat mata, tetapi kepala sekolah mencoba untuk menutup-nutupinya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam dunia pendidikan yang mencakup masalah kurikulum, penentuan visi dan misi serta urusan sekolah justru yang lebih menentukan semua itu adalah guru laki-laki.

Berbagai kegiatan misalnya ketika PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) ternyata dominasi guru laki-laki lebih terlihat ketika memberikan "Tausyiah" tentang berbagai macam kegiatan maka figur "Kiyai" yang sangat "sakral" di dunia NU (Nahdlatul Ulama) maka justru akan menunjukkan eksistensinya bila di banding dengan figur Bu "Nyai" (istri Kyai). Bahkan setiap peringatan PHBI maka dipastikan yang memberikan "Tausyiah" adalah seorang laki-laki, karena kedudukan laki-laki sangat tinggi sekali bila dibandingkan kedudukan perempuan baik dalam pendidikan, pekerjaan dan berbagai bidang lainnya.

Teologi yang bersumber dari al-Qur'an inilah yang sangat terasa kental di lingkungan MI Wali Songo, oleh karena itu sepanjang sejarah kepemimpinan MI Wali Songo akan selalu dipimpin oleh seorang laki-laki, bahkan ketika pihak sekolah mencoba untuk membuka penerimaan guru baru maka meskipun pihak sekolah telah menentukan pilihan namun pada akhirnya pihak yayasanlah yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi guru di MI Wali Songo. Pihak Yayasan ternyata dalam menentukan guru akan melihat dulu jenis kelaminnya, background organisasinya yaitu harus orang NU, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Sekali lagi Gender Mainstreaming tidak menjadi pertimbangan utama tetapi yang lebih dominan adalah bagaimana kuatnya relasi kepentingan dengan pihak yayasan tersebut.

[illegible]

Sebenarnya dalam memandang kedudukan Gender Mainstreaming di lingkungan pendidikan MI Wali Songo harus secara proporsional dan rasional. Hal ini juga dalam aplikasinya di lapangan utamanya di dunia pendidikan harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar lebih proporsional dalam pengambilan sebuah kebijakan yang tidak boleh didasarkan hak privilege (hak istimewa) dari orang-orang yang dimuliakan, atau berdasarkan ke"tokohan", atau kekuasaan ataupun yang lainnya tetapi berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan berbagai kriteria-kriteria yang tepat agar dunia pendidikan kedepan lebih maju dan berkembang serta mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya.

bagai kriteria-kriteria yang tepat agar dunia pendidikan kedepan lebih maju dan
seimbang serta mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya.

G. Simpulan

Berdasarkan paparan penelitian dan deskripsi dari laporan penelitian serta analisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga pendidikan SD Muhammadiyah 1 Gempol Sidoarjo dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Wali Songo telah berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga tersebut dengan berusaha mencerminkan sensitivitas gender dalam dunia pendidikan namun dalam pelaksanaannya belum secara sempurna untuk menerapkannya hal ini karena terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghalang terhadap sensitivitas gender tersebut, diantara faktor-faktor tersebut adalah anggapan umum di masyarakat bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan yang dipandang tetap relevan di masyarakat sehingga eksistensi perempuan menjadi ter subordinasi hampir dalam setiap aspek di dunia pendidikan.
2. Relasi gender di lingkungan guru yaitu antara guru laki-laki dan perempuan tetap tidak dapat di hilangkan, hal ini hampir selalu terjadi dalam setiap aktivitas di dunia pendidikan utamanya relasi antar guru. Guru laki-laki selalu mendapat tempat yang lebih terhormat dan dimulyakan bahkan dalam setiap kegiatan misalnya rapat-rapat guru di lingkungan sekolah maka pendapat, saran, masukan dan kritikan dari guru-guru laki-laki lebih mendapatkan tempat dan menjadi kebijakan bila dibandingkan dengan guru perempuan dalam dunia pendidikan, bahkan ketika mengadakan rencana aksi dari keputusan rapat guru maka guru laki-laki yang dipandang pantas untuk menjadi pemimpin/leader dalam kegiatan tersebut.
3. Potret relasi gender dalam kurikulum yang diajarkan kepada siswa sebenarnya mulai ada harapan untuk menunjukkan keberpihakan kepada semua jenis kelamin, tetapi dalam prakteknya dilapangan selalu muncul keberpihakan dan dominasi laki-laki bila dibandingkan dengan perempuan. Terutama kurikulum agama Islam yang justru menunjukkan dominasi laki-laki lebih menonjol bila dibandingkan dengan perempuan, salah satu contoh misalnya ketika menjadi hafalan-hafalan surat al-Qur'an, ketika adzan, ketika menjadi Imam bahkan ketika proses LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) maka akan terlihat jelas relasi gender tidak akan seimbang, karena selalu terjadi subordinasi perempuan atas laki-laki, sehingga laki-laki selalu dominan dalam aktifitas di dunia pendidikan.

identitas gender, karena dalam pandangan Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, dan antara yang cantik atau jelek, justru menurut pandangan Allah adalah tingkat ketakwaannya manusia tersebut. Kesetaraan dapat dijadikan pijakan awal untuk mengatasi ketidaksetaraan. Artinya relasi gender laki-laki terhadap perempuan dapat dimengerti sebagai semangat untuk bersaing secara sehat dalam dunia yang penuh kesetaraan dan keadilan, karena pada hakekatnya agama Islam membebaskan pihak perempuan justru menempatkan mereka setara hingga doktrin Agama sebagai justifikasi terhadap ketidaksetaraan tinjau ulang.

- bedakan identitas gender, karena dalam pandangan Allah semua manusia tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, antara yang kaya, miskin, antara yang cantik atau jelek, justru menurut pandangan Allah membedakan adalah tingkat ketakwaannya manusia tersebut kepada Allah. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk mengatasi kesenjangan pendidikan utamanya relasi gender laki-laki terhadap perempuan agar tercipta keadilan dan semangat untuk bersaing secara sehat dalam dunia pendidikan. Pentingnya kesetaraan dan keadilan, karena pada hakekatnya ajaran Agama Islam pernah membelenggu pihak perempuan justru menempatkannya di posisi yang mulia, sehingga doktrin Agama sebagai justifikasi terhadap dominasi laki-laki untuk di tinjau ulang.